

ABSTRAKSI

Otonomi pendidikan tinggi menjadi isu baru dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini, permasalahan pendidikan tinggi selama ini juga masih terfokus pada kualitas dan pemerataannya, pendanaan, serta pengelolaan manajemen. Dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan, pembagian institusi pendidikan kedalam unit unit organisasi yang lebih fokus dan spesialis tidak bisa dihindari lagi. Maka otonomi pendidikan tidak hanya terjadi pada tingkatan universitas tetapi juga terjadi dalam pengelolaan dan unit kerja universitas. Inilah satu tantangan Perguruan Tinggi saat ini, yaitu pengendalian dalam atmosfer otonomi dan desentralisasi. Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian merupakan suatu sarana untuk mendukung pengendalian dalam organisasi yang telah melakukan desentralisasi pada unit kerja atau divisi organisasi.

Objek penelitian adalah Universitas Airlangga BHMN, yang merupakan salah satu universitas BHMN yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan merupakan data kantor pusat yang sesuai dengan elemen-elemen akuntansi pertanggungjawaban yang ada dan digunakan sebagai alat pengendalian manajemen. Penelitian ini difokuskan pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban setelah Universitas Airlangga berstatus BHMN.

Hasil Penelitian menggambarkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban Universitas Airlangga belum dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi, pembagian kewenangan dan juga desentralisasi tanggung jawab pada unit kerja telah dilakukan, namun belum adanya pusat pertanggungjawaban yang digunakan dalam penilaian. Dalam perencanaan anggaran telah melibatkan unit kerja, sementara penggunaan kode rekening dan pembagian biaya belum mencerminkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Penyusunan laporan pertanggungjawaban juga sudah dilakukan dengan baik namun perlu penyempurnaan dan penandingan dengan anggaran yang ada. Hal yang paling penting adalah belum adanya penilaian kinerja terhadap unit kerja secara finansial dalam rangka pengendalian manajemen, kecuali evaluasi penyerapan anggaran atau realisasi anggaran.

Kata Kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban, Pengendalian Manajemen